

INTISARI

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) memperoleh kewenangan otonomi kelembagaan tertinggi di antara semua PTN di Indonesia. Untuk menguji sejauh mana tingkat kemandirian finansial PTN-BH dengan status otonomi tersebut, studi ini mendefinisikannya sebagai ketidaktergantungan pada dana pemerintah dan biaya pendidikan; terutama biaya pendidikan diploma dan sarjana. Kemampuan PTN-BH dalam mendiversifikasi pendapatannya ke delapan sumber sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 26/2015 juga diuji.

Penelitian ini menguji korelasi antara rasio kemandirian finansial dan indeks diversifikasi pendapatan dengan metode statistik regresi linear berganda menggunakan variabel kontrol aktiva bersih dan peringkat perguruan tinggi. Rasio kemandirian finansial yang digunakan merupakan derivasi dari rasio kemandirian finansial Pemerintah Daerah sedangkan indeks diversifikasi pendapatan diderivasi dari *Herfindahl-Hirschman Index*. Penelitian ini juga melakukan uji beda rata-rata *Independent-Sample t Test* untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan PTN-BH yang berusia >10 tahun dan <10 tahun. Yang terakhir adalah analisis deskriptif terhadap masing-masing rasio tersebut dengan skala interval. Data yang diperoleh dan diolah adalah 8 dari 11 PTN-BH selama periode 2016-2020 (5 tahun).

Hasil penelitian ini mendukung argumen teoretis bahwa kemandirian finansial perguruan tinggi dapat ditingkatkan melalui diversifikasi sumber pendapatan. PTN-BH yang penetapannya sudah lebih dari 10 tahun, finansialnya lebih mandiri daripada PTN-BH yang penetapannya masih kurang dari 10 tahun, pun dengan kemampuan diversifikasi pendapatannya. Namun, tidak ada satu pun PTN-BH yang telah mandiri secara finansial. Rata-rata Indeks Diversifikasi Pendapatan semua PTN-BH juga masih sangat terkonsentrasi kecuali UGM dan UI.

Kata kunci: otonomi, kemandirian keuangan, pendidikan tinggi, PTN-BH, diversifikasi pendapatan

ABSTRACT

Legal Entity State Universities (*or Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum/PTN-BH*) obtains the highest institutional autonomy authority among all public universities in Indonesia. To examine whether a PTN-BH is financially independent with the said autonomy, this study defines it as being non-dependent on both government funds and tuition fees, especially from undergraduate and vocational degree. Therefore, their ability to diversify their revenue into eight sources in compliance with Government Regulation No. 26/2015 is also examined.

Multiple linear regression statistical method was used to examine the correlation between financial independence and revenue diversification controlled by net asset and rank score. The main variables are ratios derived from regional government's financial Independence ratio and *Herfindahl-Hirschman* Index. Independent-Sample t Tests is also used to examine whether PTN-BH established >10 years are more financially independent and diversified than PTN-BH established <10 years old. Last, the respective ratios are analyzed in descriptive through interval scales. The data obtained and processed are 8 out of 11 PTN-BH during the 2016-2020 period (5 years).

The results of this study support the theoretical argument that the financial independence of universities can be improved through diversification of revenue sources. PTN-BH that have been established for >10 years are more financially independent than PTN-BH that have been established for <10 years, as well as their ability to diversify their revenues. However, none of the PTN-BHs are financially independent. The average Revenue Diversification Index of all PTN-BHs is also still highly concentrated except for UGM and UI.

Keyword: autonomy, financial independence, higher education institution, legal entity, public university, revenue diversification